

## **BAB III**

### **PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGGULANGI KENAKALAN PELAJAR DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014-2016**

#### **A. Peran Dinas Sosial dalam Menanggulangi Kenakalan Pelajar Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2014-2016**

##### **1. Peran Dinas Sosial DIY**

Peran merupakan proses dinamis kedudukan (status). Pada sebuah organisasi, setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Tugas-tugas tersebut merupakan batasan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan yang telah diberikan berdasarkan peraturan-peraturan dari organisasi atau lembaga tersebut agar segala pekerjaan dapat tertata dengan rapi dan dapat dipertanggungjawabkan oleh setiap para anggota yang terlibat di dalamnya sesuai dari karakteristik masing-masing (Soekarto, 2009)

Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan instansi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dibidang sosial yang memiliki peran khusus berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 46 Tahun 2008 tentang tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam menjalankan peran sosial. Adapun Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memenuhi perannya juga

berlandaskan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2014 yang mengatur sistem akuntabilitas kerjanya dalam menanggulangi kenakalan remaja terutama pelajar di DIY dimana kenakalan remaja menurut Gemari (2002) dipandang sebagai proses pendewasaan yang merupakan awal dalam mengenal dan mengerti serta menyelami proses kedewasaan. Berdasarkan pernyataan Gemari di atas, seorang remaja adalah seseorang yang berusia di bawah 24 tahun dimana pada masa tersebut mengalami proses pendewasaan yang tidak terlepas dari beberapa gejala pribadi yang dipengaruhi oleh lingkungan di mana mereka berada.

Peneliti dalam menganalisa peran dinas sosial DIY pada program penanggulangan kenakalan pelajar di DIY menggunakan data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2014 hingga 2016 yang mengacu pada sasaran strategis penanggulangan anak bermasalah sosial.

#### a. Evaluasi Pencapaian Kinerja Dinas Sosial DIY Tahun 2014

##### i. Pencapaian kinerja

Dinas sosial DIY telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada perjanjian kinerja dinas sosial DIY tahun 2014 yang telah disepakati. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis dinas sosial DIY beserta target dan capaian realisasinya yang berkaitan dengan kasus kenakalan remaja terutama pelajar dirinci dalam tabel berikut :

Tabel : kinerja dinas sosial 2014

NO	Sasaran Strate Gis	Indikator Kinerja	Sa Tu An	Tar Get	Real Isasi	Per Sen Tase	Krite Ria	Ko De
I	Prosentase perkembangan nya modal sosial masyarakat melalui kegiatan kesetiakawana n sosial dan peningkatan jiwa nasionalisme pada generasi muda dan masyarakat		%	45	50.66	112.58	Sangat baik	
		1	Prosentase perkembanganny a modal sosial masyarakat melalui kegiatan kesetiakawanan sosial	%	4.21	11.71	278.15	Sangat baik
		2	Prosentase peningkatan jiwa nasionalisme pada generasi	%	2.81	21.71	772.6	Sangat baik

			muda dan masyarakat						
		3	Prosentase peningkatan jaminan kesejahteraan keluarga pahlawan perintis kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan	%	100	69.23	69.23	Sedang	
		4	Prosentase peningkatan kerapian, kebersihan dan keindahan TMPN/MPN (4 TMP dan 19 MPN) TMPN Kusumanegara (Yk), Kusuma Bangsa (BTL), Bakti Pertiwi (GK), Giripeni (KP)	%	73	100,00	136.99	Sangat baik	

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pada sasaran strategi berkembangnya modal sosial masyarakat melalui kegiatan kesetiakawanan sosial dan peningkatan jiwa nasionalisme pada generasi muda dan masyarakat di ketahui pada

tahun 2014 dinas sosial mempunyai target 45% dalam meraih sasaran strategi namun terealisasi 50,66% sehingga memiliki kriteria sangat baik dalam upaya meningkatkan jiwa nasionalisme generasi muda khususnya remaja/pelajar sehingga kasus kenakalan remaja (pelajar) dapat diturunkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja dinas sosial Yogyakarta untuk indikator prosentase anak bermasalah sosial, korban bencana, lanjut usia terlantar, dan penyandang disabilitas yang mengalami peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial pada tahun 2014 telah dapat meraih target lebih dari yang diharapkan dan hal ini berarti bahwa dinas sosial dalam menanggulangi kasus kenakalan remaja khususnya pelajar dapat berfungsi positif.

## ii.Sasaran Strategis

Sasaran strategis Dinas Sosial Yogyakarta pada tahun 2014 juga menekankan pada aspek prosentase perkembangan modal sosial masyarakat melalui kegiatan kesetiakawanan sosial dan peningkatan jiwa nasionalisme pada generasi muda dan masyarakat melalui program –program yang diselenggarakan oleh BPRSR dengan indikator kerja yaitu prosentase perkembangan modal sosial masyarakat melalui kegiatan kesetiakawanan sosial yang mencapai target sebesar 4,21 dengan kriteria sangat baik, indikator kinerja ke 2 yang berhubungan dengan peningkatan jiwa nasionalisme pada generasi muda mencapai target 2,81% dengan kriteria sangat baik pula, indikator kinerja ke 3 yang berhubungan dengan peningkatan jaminan kesejahteraan keluarga pahlawan perintis kemerdekaan mencapai target 100% dengan kriteria sedang sedangkan indikator kinerja pada peningkatan kerapian,

kebersihan, dan keindahan taman makam pahlawan Kusumanegara, Kusuma Bangsa, Bakti Pertiwi dan Giripeni mencapai target sebesar 70 % dengan kriteria sangat baik.

Sasaran strategis Dinas Sosial di atas memiliki keterkaitan erat dengan upaya penanggulangan kenakalan pelajar di Daerah Istimewa Yogyakarta karena beberapa indikator kinerja tersebut akan mempengaruhi perilaku dan sikap remaja khususnya pelajar di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme mereka sehingga memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap ketertiban dan keamanan di Yogyakarta sebagai kota Pelajar dan Budaya dan menjalankan fungsinya dalam menjaga keutuhan Yogyakarta dengan berperan aktif di bidang pendidikan dan sosial. Di satu sisi, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Sosial telah melakukan pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan pada realisasi kerja tahun 2014 mengenai peningkatan jiwa nasionalisme generasi muda sebagai tolak ukur kinerja pemerintah dalam menanggulangi kenakalan remaja khususnya pelajar di Daerah Istimewa Yogyakarta yang di ketahui bahwa pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah berhasil mengupayakan penurunan angka kenakalan remaja ditahun 2014.

b. Evaluasi Pencapaian kinerja Dinas Sosial DIY tahun 2015

i. Pencapaian kinerja

Dinas sosial DIY telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada perjanjian kinerja dinas sosial DIY tahun 2015 yang telah disepakati. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis

dinas sosial DIY berserta target dan capaian realisasinya yang berkaitan dengan kasus kenakalan remaja terutama pelajar dirinci dalam tabel berikut :

Tabel: kinerja dinas sosial 2015

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SA TU AN	TAR GET	REAL ISASI	PERSEN TASE	KRITERIA KODE
1	Meningkatnya kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial bagi anak bermasalah soaial, korban bencana, lanjut usia terlantar, dan penyandang disabilitas	1 Prosentase anak bermasalah sosial, korban bencana, Lanjut usia terlantar, dan penyandang disabilitas yang mengalami peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial	%	27,20	79,13	290,92	Hijau tua

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pada sasaran strategi meningkatnya kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial bagi anak bermasalah soaial, korban bencana, lanjut usia terlantar, dan penyandang disabilitas

ketahui pada tahun 2015 dinas sosial mempunyai target 27% dalam meraih sasaran strategi namun terealisasi 79,13% sehingga memiliki kriteria sangat baik dalam upaya meningkatkan jiwa nasionalisme generasi muda khususnya remaja/pelajar sehingga kasus kenakalan remaja( pelajar ) dapat diturunkan sejak dari tahun 2014 hingga tahun 2015.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja dinas sosial Yogyakarta untuk indikator prosentase anak bermasalah sosial, korban bencana, lanjut usia terlantar, dan penyandang disabilitas yang mengalami peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial pada tahun 2015 telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan dapat meraih target lebih dari yang diharapkan dan hal ini berarti bahwa dinas sosial dalam menanggulangi kasus kenakalan remaja khususnya pelajar dapat berfungsi secara maksimal.

## ii. Sasaran Strategis

Analisa pencapaian kinerja sasaran dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial bagi anak bermasalah sosial, korban bencana, lanjut usia terlantar, dan penyandang disabilitas pada anak bermasalah sosial, korban bencana, lanjut usia terlantar, dan penyandang disabilitas yang mengalami peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial.

Sasaran meningkatnya kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial. Korban bencana, lanjut usia terlantar, dan penyandang disabilitas dipilih menjadi sasaran strategis karena menyesuaikan dari misi 1 Dinas Sosial DIY yaitu



mnyelenggarakan perlindungan sosial, bantuan dan jaminan sosial, serta rehabilitasi sosial. Karena Dinas Sosial Fokusnya adalah penanganan PMKS dan pemberdayaan PSKS, maka untuk penanganan dengan konsep perlindungan sosial, bantuan dan jaminan sosial,, serta Rehabilitasi sosial PMKS yang masuk adalah anak bermasalah sosial, korban bencana, lanjut usia terlantar, dan penyandang disabilitas.

Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial bagi anak bermasalah sosial, korban bencana, lanjut usia terlantar, dan penyandang disabilitas dilakukan melalui beberapa kegiatan menurut jenis PMKS yang bersangkutan, misalnyya untuk bermasalah sosial dengan kegiatan perlindungan dan rehabilitasi anak bermasalah sosial yang didalamnya meliputi pengasramaan SLB, bantuan pemenuhan kebutuhan dasar anak dengan HIV/AIDS, bantuan pemenuhan kebutuhan dasar anak bermasalah dengan hukum, bantuan pemenuhan dasar anak disabilitas, pelayanan dan perlindungan sosial anak terlantar luar.

Sasaran strategis Dinas Sosial di atas juga memiliki keterkaitan erat dengan upaya penanggulangan kenakalan pelajar di Daerah Istimewa Yogyakarta karena beberapa indikator kinerja tersebut akan mempengaruhi perilaku dan sikap remaja khususnya pelajar di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme mereka sehingga memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap ketertiban dan keamanan di Yogyakarta sebagai kota Pelajar dan Budaya dan menjalankan fungsinya dalam menjaga keutuhan Yogyakarta dengan berperan aktif di bidang pendidikan dan sosial dan bagi para remaja khususnya pelajar yang memiliki masalah sosial dapat memfungsikan dirinya sebagai pribadi yang mandiri

dalam masyarakat dengan menerapkan keterampilan yang mereka dapatkan selama pembinaan di BPRSR Yogyakarta.

Di satu sisi, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Sosial telah melakukan peran yaitu pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan pada realisasi kerja tahun 2015 mengenai peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial bagi anak bermasalah sosial, korban bencana, lanjut usia terlantar, dan penyandang disabilitas dimana secara tidak langsung pemerintah DIY telah mengupayakan penurunan angka kenakalan remaja ditahun 2015.

#### c. Evaluasi Pencapaian kinerja Dinas Sosial DIY tahun 2016

##### i. Pencapaian kinerja

Dinas sosial DIY telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada perjanjian kinerja dinas sosial DIY tahun 2016 yang telah disepakati . Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis dinas sosial DIY berserta target dan capaian realisasinya yang berkaitan dengan kasus kenakalan remaja terutama pelajar dirinci dalam tabel berikut :

Tabel : kinerja dinas sosial 2016

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/KODE
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial bagi anak bermasalah sosial, korban bencana, lanjut usia terlantar, dan penyandang disabilitas	Prosentase anak bermasalah sosial, korban bencana, lanjut usia terlantar, dan penyandang disabilitas yang mengalami peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial	%	28,35	53,13	187,41	Sangat Baik / Hijau Tua

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pada sasaran strategi meningkatnya kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial bagi anak bermasalah sosial, korban bencana, lanjut usia terlantar, dan penyandang disabilitas di ketahui pada tahun 2016 dinas sosial mempunyai target 28,35 % dalam meraih sasaran strategi namun terealisasi 53,13% sehingga memiliki kriteria sangat baik dalam upaya meningkatkan jiwa nasionalisme generasi muda khususnya

remaja/pelajar sehingga kasus kenakalan remaja ( pelajar ) dapat diturunkan dari tahun 2015 hingga tahun 2016.

## ii.Sasaran Strategis

Realisasi kinerja untuk indikator prosentase anak bermasalah sosial, korban bencana, lanjut usia terlanjar, dan penyandang disabilitas yang mengalami peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial pada tahun 2016 yang telah melebihi dari target jangka menengah yang telah ditetapkan di dalam dokumen RENSTRA. Di tahun 2016, dinas sosial dapat merealisasikan kinerjanya sebesar 53,13 sedangkan target jangka menengah sampai 2017 adalah sebesar 29,84%. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, beberapa faktor pendorong yang menyebabkan capaian kinerja untuk prosentase anak bermasalah sosial, korban bencana, lanjut usia terlanjar, dan penyandang disabilitas yang mengalami peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial tahun 2016 tercapai bahkan melebihi target yang telah di tentukan adalah dukungan melalui dana dekonsentrasi dan lunjukan dari pusat atau pemerintah RI sehingga realisasi kinerja tersebut dapat melebihi target disamping itu juga didukung oleh tersedianya data PMKS dan PSKS terbaru untuk bahan penentuan sasaran, tersedianya lembaga kesejahteraan sosial terkait dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan kerjasama yang baik dengan instansi kabupaten atau kota, masyarakat dan pihak-pihak terkait dengan yang direncanakan.

Pada indikator prosentase anak bermasalah sosial, korban bencana, lanjut usia terlanjar, dan penyandang disabilitas yang mengalami peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial terdapat beberapa kegiatan yang mendukung

dalam menunjang keberhasilan anak bermasalah sosial dan masyarakat target binaan lain adalah pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti/jompo; perlindungan, rehabilitasi sosial dan penyandang disabilitas; perlindungan dan rehabilitasi anak bermasalah sosial ;pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar serta penguatan kesiapsiagaan dan perlindungan sosial korban bencana.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja dinas sosial Yogyakarta untuk indikator prosentase anak bermasalah sosial, korban bencana, lanjut usia terlantar, dan penyandang disabilitas yang mengalami peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial pada tahun 2016 telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan dapat meraih target lebih dari yang diharapkan dan hal ini berarti bahwa dinas sosial dalam menanggulangi kasus kenakalan remaja khususnya pelajar dapat berfungsi secara maksimal sesuai yang diharapkan.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis dinas sosial Yogyakarta yang berkaitan dengan penanganan kasus sosial teruma terkait dengan upaya dalam menanggulangi kenakalan remaja mengalami peningkatan prosentasi capaian yang dapat dibuktikan dengan menurunnya angka prosentase realisasi capaian sasaran dari tahun 2014 hingga tahun 2016.

## **2. Alokasi anggaran pendapatan belanja daerah ( APBD) untuk dinas sosial.**

### **a. Alokasi anggaran pendapatan belanja daerah ( APBD) untuk dinas sosial 2014**

Program pelayanan dan perlindungan anak bermasalah sosial pada tahun 2014 diketahui memiliki target anggaran sebesar : Rp.24.262.093.800 namun hanya terealisasi sebesar Rp. 22.165.195.978 dimana dana tersebut digunakan untuk kebutuhan dinas sosial dalam memenuhi program pelayanan dan perlindungan anak bermasalah sosial.

### **b. Alokasi anggaran pendapatan belanja daerah ( APBD) untuk dinas sosial 2015**

Program pelayanan dan perlindungan anak bermasalah sosial pada tahun 2015 diketahui memiliki target anggaran sebesar: Rp 10.508.017.700 namun hanya terealisasi sebesar Rp 9.876.003.039 dimana dana tersebut digunakan untuk kebutuhan dinas sosial dalam memenuhi program pelayanan dan perlindungan anak bermasalah sosial.

### **c. Alokasi anggaran pendapatan belanja daerah ( APBD) untuk dinas sosial 2016**

Program pelayanan dan perlindungan anak bermasalah sosial pada tahun 2016 diketahui memiliki target anggaran sebesar: Rp 1.401.202.000 namun hanya terealisasi sebesar Rp 1.305.090.301 dengan deviasi sebesar 6,86 % dimana dana tersebut digunakan untuk kebutuhan dinas sosial dalam memenuhi program pelayanan dan perlindungan anak bermasalah sosial.

Berdasarkan Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD) untuk dinas sosial tahun 2014 hingga tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah DIY dalam pelayanan dan perlindungan anak bermasalah sosial untuk Daerah Istimewa Yogyakarta diketahui telah mengeluarkan anggaran sebesar: Rp 36.171.313.500 dan hanya terealisasi sebesar Rp 33.346.289.318 karena anggaran tersebut dikatakan cukup dalam memenuhi target tiap tahunnya untuk merealisasikan perlindungan anak bermasalah sosial di DIY.

## **B. Analisis Hasil Wawancara Dengan Kepala Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Terkait Fungsinya Sebagai Perpanjangan Tangan Dinas Sosial DIY dalam Menanggulangi Kenakalan Pelajar di DIY**

### **1. Pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis BPRSR**

Peran dinas sosial dalam menanggulangi kenakalan pelajar di DIY tidak terlepas dari peran serta atau kinerja dari Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) dimana balai tersebut merupakan perpanjangan tangan dari dinas sosial Yogyakarta dalam memberikan binaan sosial terhadap semua remaja tidak terlepas juga para pelajar yang memiliki kasus hukum dan sosial.

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta merupakan unit pelaksanaan teknis ( UPTD ) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur No 100

tahun 2015 tentang pembentukan, susunan Organisasi, Uraian tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas Sosial DIY yang memiliki fungsi yaitu menyusun program balai; menyusun pedoman teknis pelayanan perlindungan, rehabilitasi, advokasi sosial, reunifikasi dan rujukan; menyebarluaskan informasi dan sosialisasi pelaksanaan pemetaan masalah kesejahteraan sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum; melaksanakan identifikasi dan pemetaan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial remaja terlantar bermasalah sosial dan anak berhadapan dengan hukum menjadi bahan utama wawancara peneliti.

BPRSR dalam melaksanakan fungsinya tersebut diketahui telah menyediakan beberapa fasilitas yang diantaranya adalah fasilitas pendampingan, mediasi pelaku dan korban anak yang berhadapan dengan hukum; penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan perlindungan, rehabilitasi, advokasi sosial, reunifikasi dan rujukan remaja bermasalah sosial dan anak berhadapan dengan hukum; penyelenggaraan jejaring penanganan remaja bermasalah sosial dan anak berhadapan dengan hukum; fasilitas pelayanan perlindungan, rehabilitasi, advokasi sosial, reunifikasi anak berhadapan dengan hukum berbasis keluarga; fasilitas penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial untuk pelayananan perlindungan dan rehabilitasi anak bermasalah sosial dan anak berhadapan dengan hukum; pelaksanaan ketatausahaan; pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program balai serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dengan tugas dan fungsinya dimana semua



fasilitas tersebut juga menjadi landasan pertanyaan peneliti dalam melakukan wawancara.

## **2.Hasil Wawancara**

Peneliti juga melakukan wawancara dengan kepala staf BPRSR mengenai tujuan pelayanan seperti mewujudkan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial anak dan remaja bermasalah sosial agar, trampil, mandiri dan berkualitas, dan bertanggung jawab melalui bimbingan fisik, mental, sosial dan rehabilitasi sosial serta bimbingan ketrampilan; menjadikan BPRSR sebagai pusat informasi dalam pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja bermasalah sosial dan anak berhadapan dengan hukum ( ABH ); program pelayanan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) seperti program pelayanan jangka pendek (rumah antara 1-3 bulan), program pelayanan jangka menengah (3-6 bulan) dan program pelayanan jangka panjang (6-12 bulan) serta jenis pelayanan mengenai pemenuhan kebutuhan pokok/dasar dan bimbingan fisik.

Beberapa pertanyaan dalam daftar wawancara yang diajukan peneliti terhadap kepala staf BPRSR juga mencakup persyaratan masuk siswa binaan seperti remaja bermasalah sosial yang meliputi remaja bermasalah sosial dan atau remaja drop out sekolah usia 14-21 tahun, mengajukan permohonan langsung, rujukan dari aparat setempat dan atau instansi terkait sehat jasmani dan rohani, menyerahkan surat keterangan surat dari desa setempat atau perujuk, menyerahkan fotocopy kartu keluarga, bersedia mengikuti program pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial, menaati peraturan tata tertib yang berlaku dan mendatangi kontrak/kesepakatan pelayanan.

Sedangkan untuk anak yang berhadapan dengan hukum diberlakukan beberapa persyaratan seperti titipan aparat penegak hukum (ABH) dengan menyerahkan surat permohonan penitipan dengan batas waktu dan surat pernyataan penitip tentang jaminan pengamanan anak dan lembaga serta resum kasus/Kronologis kasus dan anak bermasalah hukum yang bukan titipan dari penegak hukum wajib menyerahkan surat pengantar/permohonan kepada lembaga, resum kasus/Kronologi kasus, surat pernyataan pihak perujuk, orangtua/keluarga/wali, untuk selalu kooperatif serta himbauan dari BPRSRS seperti tidak menuntut apabila terjadi hal-hal khusus (kabur/meningalkan lembaga tanpa ijin).

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti telah melakukan wawancara dengan kepala seksi BPRSRS yaitu dengan DR.C. Bambang Sautosa Hadi pada tanggal 15 Maret 2017 mengenai semua program yang dicanangkan oleh BPRSRS dimana semua program tersebut mendapatkan pemantauan dari dinas sosial secara berkala. Fungsi pemantauan tersebut adalah untuk mengetahui sejauhmana fungsi dari BPRSRS dalam tugasnya untuk menanggulangi kenakalan remaja terutama pelajar di DIY. Sehingga dinas sosial sebagai institusi yang diharapkan oleh masyarakat dalam menangani kenakalan remaja tersebut dapat memenuhi perannya secara maksimal.

Wawancara yang sudah dilakukan oleh penelitian menghasilkan beberapa poin sebagai berikut:

- a. Beberapa siswa binaan dalam BPRSRS adalah remaja dan atau pelajar yang memiliki kasus hukum dan sosial dimana jumlah kasus tersebut mengalami perubahan dalam tiap bulannya. Siswa binaan BPRSRS

diantaranya merupakan titipan penyidik perkara kasus hukum yang bersifat sementara dan harus menjalani proses hukum selanjutnya, sementara siswa binaan kasus sosial merupakan siswa yang mendapatkan binaan di asrama dengan beberapa keterampilan atau skill yang diberikan oleh pengelola dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan yang mandiri dan siap kerja di lapangan apabila telah keluar dari asrama PBRSR. Di lain pihak, beberapa siswa binaan dengan kasus sosial diberikan ijin untuk pulang selama mengikuti aktivitas di asrama dengan persyaratan yang telah dipertimbangkan oleh pengelola BPRSR.

b.Siswa binaan BPRSR diketahui memiliki kasus sosial yang diantaranya adalah siswa dengan korban kekerasan dalam rumah tangga seperti perceraian orang tua, putus sekolah dan trauma kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang di sekitar lingkungan mereka berada.

c.Siswa binaan BPRSR diketahui memiliki kasus hukum yang diantaranya adalah penjabretan, perkelahian, penganiayaan, pencurian, namun untuk kasus pembunuhan remaja tersebut harus meneruskan proses hukum di persidangan dan mengikuti prosedur hukum selanjutnya.

d.Berdasarkan kebijakan baru Sri Sultan Hamengku Buwono X, untuk remaja dan atau pelajar yang tersandung kasus klithih dengan penganiayaan dan pembunuhan harus diberlakukan sangsi hukum dan besar kemungkinan dimasukkan ke penjara dengan pertimbangan secara hukum serta mengingat dampak yang terjadi atas tindakan atau perilaku para remaja dan atau pelajar.

e.Semua anggaran aktifitas pembinaan dari BPRSR dalam meningkatkan kualitas skill para siswa binaan ditanggung sepenuhnya oleh BPRSR melalui kesepakatan hasil rapat dengan dinas sosial yang juga mengikutsertakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan bagian inspektorat keuangan daerah Sleman DIY dalam perealisasiian semua program binaan di BPRSR.

f.Beberapa keterampilan yang diberikan oleh BPRSR kepada siswa binaan diantaranya adalah keterampilan pengelasan, sablon, montir, menjahit dan salon yang diikuti oleh siswa binaan yang disesuaikan dengan kemampuan atau bakat masing-masing siswa dengan menghadirkan beberapa ahli yang memberikan pelatihan beberapa keterampilan tersebut. Di satu sisi, BPRSR juga menghadirkan beberapa kalangan professional untuk mendukung kondisi mental para siswa binaan seperti dokter, ustad, khotib, pendeta dan psikolog.

g.Dinas sosial DIY selalu memantau seluruh aktivitas pembinaan BPRSR dari pembinaan mental, fisik dan sosial hingga pemantauan penggunaan anggaran secara berkala.

Sehubungan dengan hal tersebut, peran dinas sosial dalam menanggulangi kenakalan remaja dan atau pelajar di DIY dapat dikatakan telah mencapai peran yang optimal khususnya remaja dan atau pelajar yang bermasalah sosial dan hukum melalui kerjasama dengan BPRSR.